

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Serjana Hukum Islam**



Oleh :

**MUHAMMAD YUSUF
10821004760**

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.**

Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Di dalam syari'at Islam telah diperintahkan kepada umatnya agar berbuat saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, diantaranya dengan memungut/merawat/menjaga anak temuan, karena dengan merawat/memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Permasalahan anak temuan ini telah dibahas dibeberapa kitab fiqih yang dikenal dengan istilah *al-laq th*, yang didefinisikan sebagai seorang anak yang hidup, yang belum baligh, yang dibuang orang tuanya karena mereka takut akan kemiskinan (tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya), atau untuk menutupi suatu perbuatan zina.

Anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, demi menjaga kelangsungan hidup, maka bagi seseorang yang menemukan *al-laq th* langkah mengambil *al-laq th* tersebut lebih utama atau wajib hukumnya untuk menyelamatkannya jika tidak ada lagi orang selain dia, karena mengambil/menghidupkan anak tersebut berarti menggugurkan dosa seluruh manusia. Kemudian permasalahannya disini adalah bagaimana jika anak temuan tersebut seorang perempuan yang nantinya akan membutuhkan peran seorang wali, maka siapakah yang menjadi wali nikahnya? disini terdapat perbedaan antara pendapat jumhur ulama dengan Ibnu Qudamah.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan, artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qudamah apabila ada orang yang menemukan kemudian ia merawat maka dia mempunyai hak untuk

menjadi wali nikah walaupun secara batin dia belum diketahui hakikat sifat adilnya/dipercaya, dikarenakan adanya beberapa indikasi tertentu seperti adanya sifat adil secara dhohir dalam diri *multaqith*, dan pertimbangan kemaslahatan antara keduanya. Sumber hukum yang digunakan adalah berdasarkan al qur'an, as-sunnah, qoul sahabat, dan *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah adalah dengan menggunakan metode *qiyas* yaitu *multaqith* disamakan dengan penguasa, hal ini dikarenakan kedua-duanya mempunyai sifat adil.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini yang berjudul **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan**, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan dan bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan. Diharapkan didalam kajian skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan Hukum Islam yang akan datang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak baik seara langsung maupun tidak langsung untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada:

1. Yang mulia ayahanda Yakub dan Ibunda Kadariah, kakanda Siti Rahmah, adinda Ahmad Sabri serta keluarga besar ananda yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta, kasih sayang dan do'a yang telah diberikan kepada ananda dengan kesabaran ketabahan yang tidak pernah putus dalam membimbing serta memberikan dorongan moril dan materil, serta senantiasa

memdo'akan keberhasilan dan kebahagiaan ananda Semua tidak bisa digantikan dengan apapun, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka amin.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pemabantu Rektor I, II dan III.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Permbantu Dekan I, II, III serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah berjasa mermerberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Ibu Dra, Jumni Nelly, MA. selaku pernbimbing dalam panulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, mangarahkan serta meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahu'alussyakhsiyyah (AH) Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Bapak perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
7. Terima kasih Saya ucapkan kepada Kawan-kawan di IPPMA-RIAU (Ikatan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam), bapak-bapak abang-abang dalam wadah PERMASA-Riau Pekanbaru (Persatuan Masyarakat Aceh) dan lain-lain yang telah banyak membantu" memberikan dorongan, motivasi kepada adinda dalam penulisan skripsi ini.
8. Serta Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 September 2013
Penulis

Muhammad Yusuf
10821004760

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II : BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah	9
B. Guru-guru Ibnu Qudamah.	14
C. Murid-murid Ibnu Qudamah.....	15
D. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah	15

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian.....	18
B. Syarat- syarat Wali nikah.....	22
C. Macam-macam Perwalian	22
D. Perwalian Al-Laqith	30

BAB IV : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK

TEMUAN

A. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan	38
B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan	45
C. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan	51

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam wali nikah adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Keberadaan seorang wali dalam nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah itu sendiri wali dapat kedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.¹

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak ada juga yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.²

Jumhur Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa adanya wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Berdasarkan hadits Nabi Saw :

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tt), h 240

² Mahmud Syalthut, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zakkiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet. ke 1, h. 121

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لا ينجحها الولي, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها, فإن شتروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari ‘Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal maka nikahnya batal, maka jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih maka hakim (penguasa) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Ibnu Majah)”³

Hadits di atas menunjukkan pengertian bahwa tidak dipandang sah pernikahan tanpa adanya wali dan yang boleh menjadi wali dalam melangsung aqad nikah itu ada yang namanya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Dan sedangkan wali hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.⁴

Kemudian hadits tersebut dijadikan dalil oleh para ulama atas hak wali berada dalam kekuasaan Sulthan (penguasa) yang memiliki kewenangan untuk menikahkan dan menguasai atas penggunaan harta orang atau anak yang tidak memiliki wali. Yang kemudian hal tersebut dinisbatkan terhadap hak merawat, mengajar, mendidik, dan menikahkan. Sedangkan tidak ada hak perwalian bagi orang yang menemukan untuk menikahkan ataupun mentasharufkan harta anak yang tidak memiliki wali (anak temuan).⁵ Dikarenakan tidak ada sebab-sebab perwalian yaitu: kekerabatan dan penguasa.⁶

³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Ibnu Majah*, terj. Iqbal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) , juz II, cet. ke-2, h 179.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana : 2009), cet. ke 2, h 75.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr), juz. 6, h. 48

⁶ Al-Kasani, *Badai' as-Shanai'*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz. 8, h. 323

Dari pemaparan di atas, akan penulis diskripsikan terdahulu pendapat ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalah wali nikah khususnya wali nikah bagi anak temuan. Mereka dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi anak temuan adalah sulthan (penguasa).

Sulthan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum ataupun khusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam, ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah.⁷ Kemudian hakim baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus seperti *qadhi* (penghulu) atau orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad-akad nikah atau akad tersebut secara khusus”⁸

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang menjadi wali bagi anak temuan adalah orang tua asuh (yang menemukan). Menurut Ibnu Qudamah ketika seorang menemukan anak temuan dan ia tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/ tidak dipercaya), maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum tersebut dihukumi adil di dalam menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah, di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil.

Dalam kenyataan kehidupan ini ternyata banyak permasalahan anak, khususnya anak temuan. Dalam hal ini tentu hukum Islam tidak akan memberikan permasalahan ini dibiarkan saja karena status anak nantinya akan berhubungan dengan hak waris, mahram dan wali nikah.⁹

Sedangkan menurut penulis yang lebih menarik dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai pendapat ulama dari golongan Hanabilah bernama Ibnu Qudamah yang berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama yakni menempatkan kedudukan *multaqith* (orang yang

⁷ Sayyid bakri, *I' anatuth Thalibin*, (Beirut Libanon: Dar al Kitab Ilmiyah, tt), juz 3, h. 214

⁸ Syekh Ibrohim *al Bajuri, al-Bajuri*, (Darul Ikhyat al Arobiyah,tt), juz 2, h.106

⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah),juz 6, h. 449

menemukan) sebagai wali nikah bagi anak temuan tersebut. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang memberikan hak terhadap *multaqith* terhadap masalah wali bagi anak temuan yang pada umumnya kekuasaannya dipegang oleh penguasa atas anak temuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat tersebut dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khasanah keislaman kita. Meskipun secara sepintas pendapat Ibnu Qudamah itu terlihat kontradiktif dengan pendapat para ulama yang lain.

B. Batasan dan Rumusan masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan ?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat Ibnu Qudamah dalam menetapkan wali nikah bagi anak temuan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan wali nikah bagi anak temuan.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya masalah wali nikah bagi anak temuan.
2. Menambah bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam konsentrasi hukum Islam pada program sarjana UIN suska riau.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Artinya mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan pustaka yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber-sumber itu terdiri dari 2 macam.

- a) Sumber data primer : Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kitab “*al-Mughni*” karangan *Ibnu Qudamah*.
- b) Sumber data sekunder : yaitu data yang diperoleh dari studi perpustakaan (*library reseach*) dan kitab-kitab yang membahas tentang fiqh munakahat diantaranya adalah *Badai’ as-Shanai’*, *al-Bajuri*, *I’anatuth Thalibin*, *Fiqh al-Sunnah* dan beberapa sumber lain yang berasal dari buku maupun kitab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*) yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Misalnya kitab-

kitab, buku-buku, majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dan berpikir penulis memakai metode sebagai berikut:

- a) Metode Induksi : yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dimana Ibnu Qudamah memahami kasus yang terjadi pada abi jamilah merupakan awal dari hasil pengamatan yang bersifat khusus yang kemudian dia menetapkan sebuah hukum kebolehan orang yang menemukan menjadi wali nikah anak temuan. (dikarenakan adanya pertimbangan sifat adil dan tanggungjawab dalam diri multaqith dan disamping itu untuk kemaslahatan bersama), adalah merupakan kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Metode Deduksi : yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatu kajian atau pengertian yang bersifat khusus dimana ketentuan yang masih bersifat umum. Dimana Ibnu Qudamah menetapkan hukum berdasarkan pemahaman terhadap hadits yang menyatakan siapa saja yang lebih dahulu atas sesuatu berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut, yang kemudian memaknai dalam menemukan anak, yang lebih berhak menikahkan adalah yang menemukannya, yang merupakan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c) Metode Komparatif : suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh.

E. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri. adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, yang meliputi, pengertian dan dasar hukum perwalian, syarat-syarat wali nikah, macam-macam perwalian, orang-orang yang harus mendapatkan perwalian, pengertian *al-laqith*, wali nikah bagi anak temuan.

BAB III : Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan, yang meliputi biografi dan karya- karya Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan, metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan.

BAB IV : Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan, meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan, analisis terhadap metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah

Beliau adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud. Asy Syaikh *Muwaffaquddin Abu Muhuntmad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hambali al-maqdisi*. Beliau berhijrah ke lereng bukit ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, tanah suci dipalestina. Saat itu tentara salib menguasai Baitil Maqdis dan daerah sekitarnya.

Beliau adalah imam dalam berbagai bidang ilmu tidak seorang pun pada zamannya setelah saudaranya yang lebih zuhud dan wara' daripada beliau. Beliau pemalu tidak tergiur dengan gemerlap dunia serta isinya. lemah lembut tutur katanya, rendah hati mencintai orang-orang miskin, baik akhlaknya, pemurah dan ringan tangan, siapa yang melihatnya seakan-akan melihat sahabat Rasulullah seolah-olah tampak cahaya dari wajahnya, banyak ibadahnya.¹

Karenanya ayahnya Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hajrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan *Muwaffaquddin*, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk *Baitul Maqdis* ke *Damaskus*. Di *Damaskus* mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid *al-Muzhaffari* yang berada di *Damaskus* dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hambali dan menjadi Imam Shalat bagi kaum muslim, para ulama pun sering

¹ Ibnu Qudamah, *op cit*, h 10.

datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.²

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wura'* nya, dan juga ketakwaannya. *Muwaffaquddin* tidak pernah merasa jemu dengan untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu *Muwaffaquddin* kembali ke bagdad, dari bagdad dia pergi ke *Baitullah al Haram* bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama *mekkah*. Dari sana, dia pun kembali lagi ke *Bagdad*.³

Di masa-masa itu *Muwaffaquddin* menghafal al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul'Abbas. seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang *zuhud*. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal *Mukhtasar al Khiraqi* (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal) dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) dan keduanya umurnya sama. *Muwaffaquddin* semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir al-Jailzrni, di Baghdad. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau *Mukhtasar al-Khiraqi* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus.

Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahinrahullah, selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadist dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatulah Ibn ad-Daqqaq dan lainnya. Seterah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 4.

³ *Ibid.* h. 5.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengaji hadist selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughni Syarh Mukhtasara al-Khiraqi* (fiqih madzab Imam Ahmad bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hambal. sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam as-Syafi'i, yang digelar *Sulthanul 'Ulama* mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *al-Mughni*". Banyak para santri yang menimba ilmu hadist kepada beliau, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya.

Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepada beliau. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan ulama-ulama lainnya seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang. Beliau banyak menulis kitab di bidang fiqih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan munaqib (sisi-sisi keagungannya).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "setelah al-Auza'i, tidak ada orang yang masuk ke negri Syam yang lebih mapan di bidang fiqih melebihi *al-Muwaffaq*". Ibnu ash Shalah berkata: "Saya tidak pernah melihat orang alim seperti *al-Muwaffaq*". cucu Ibn al-Jauzi berkata: "orang yang melihat *al-Muwfffaq* seakan-akan ia melihat salah seorang sahabat nabi. Seakan-akan cahaya memancar dari wajahnya." Imam *al-Muwffaqiq* adalah seorang

imam di berbagai disiplin ilmu syar'i. Di zaman beliau, setelah saudaranya (Abu Umar), tiada orang yang lebih *zuhud*, lebih *wara'* dan lebih mapan ilmunya melebihi beliau.⁴

Beliau mengikuti jejak as-Salaf dalam masalah aqidah, *kezuhudan*, dan kewara'an. Beliau sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan dari pengejanya. Beliau sosok yang pemaaf, tidak kaku dan sangat rendah hati, cinta kepada orang yang kesusahan, mulia akhlaknya, banyak berkorban untuk orang lain, tekun beribadah, kaya keutamaan, berotak cerdas, sangat jeli dalam ilmunya. sangat tenang, sedikit bicara, dan banyak kerja. orang merasa tentram dan damai dengan sekedar memandang wajahnya walau sebelum beliau berbicara.

Kebaikan dan kemuliaan sifat beliau tidak terhitung. al-Hafidzh Dhiya'uddin al-Maqdisi. demikian jugu al-Hafidzh adz-Dzahabi. Menulis sebuah kitab tentang biogrifi Imam Ibnu Qudamah ini. Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan. akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka.

Para penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya, Abu Umar, beserta murid-murid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panji para mujahidin yang dimenangkan oleh Allah ini. Beliau berdua dan murid-muridnya mempunyai satu kemah yang senantiasa berpindah-pindah kemanapun para mujahidin berpindah dan rnengambil posisi. Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab).

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni syar al-Kabir*, op cit, h 10.

Muwaaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al Maqdisi, paman *Muwaaffaquddin*. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak: 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhl Muhammad, Abu al'Izzi Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiyah. *Muwaaffaquddin* adalah seorang yang berparas tampan. Diwajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.⁵

B. Guru-guru Ibnu Qudamah

Dari penjelasan diatas, kita telah mengetahui bahwa Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru, akan tetapi guru-guru beliau berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Disini penulis akan menyebutkan sebahagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi al-Maqdisi di Baghdad.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih.
3. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal.
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud

⁵ *Ibid*, h 5.

5. Abu al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu al-Mina an-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama islam.
6. Muhammad bin Muhammad as-Sakan.
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.
8. Abu al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyaqi.
9. Abu al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi.
10. Abu Muhammad al Mubarak bin Ali al Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih.

C. Murid-murid beliau.

Diantara murid-murid Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut :

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al Maqdisi ash-Shalihi al Hanbali.
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar ash-Sharifain al Hanbali, seorang hafizh.
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi.
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i.
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafi al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir.
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi al Jumma'ili.⁶

D. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain⁷:

⁶ *Ibid*, h 8.

1. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. *Syarh Mukhtasar al-Khiraqi* (didalam kitab ini ia paparkan dasar-dasar pemikiran/madzhab Ahmad dandalil-dalil para ulama⁷ dari berbagai madzhab, untuk membimbing ilmuan fiqh yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalan metode ijtihad)
2. *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar di kitab ini ia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
3. *Al-Umdah fi al Fiqh*, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah .
4. *Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh*, kitab ushul fiqh tertua dalam madzhab Hanbali.
5. *Mukhtasar ,ilal al-Hadis*, membicarakan tentang cacat-cacat hadis.
6. *Mukhtasar fi Ghaarib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
7. *Al-Burhan fi-Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
8. Kitab *al-Qadr*, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
9. *Fadhaail as-Sahabah*, membicarakan tentang kelebihan para sahabat.
10. kitab *at-Tawwabin fi al-Hadits*, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
11. *Al-Mutahaabin filllah*, membicarakan tentang tasawuf.
12. *Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar*, membicarakan tentang keturunan orang anshor
13. *Manasik Haji*.
14. *Zamm at-Ta'wil*, membahas tentang ta'wil.
15. *Al-Muqni'* (untuk pelajar tingkat menengah)
16. *Al-Riqqah wal Buka'*.
17. *Dzamm al-Muwaswasin*.
18. *Al-Tibyan fi Nasab al-Qurassiyin*.
19. *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad*

⁷ M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), cet. ke-2, h 279.

“Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *al-Mughni* adalah, bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: “*Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.*”⁸

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *al-Mughni* (fiqh) dan *Raudhah an-Nadhair* (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab Hanbali dan ulama” lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.”⁹

⁸ *Ibid*, h. 282

⁹ *Ibid*.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

a. Pengertian perwalian

Dalam membicarakan masalah perwalian, ada dua pengertian yang perlu dikemukakan, yaitu secara bahasa (etimologi) dan perwalian secara istilah (terminologi)

1) Secara etimologi

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut *al-walayah* (*al wilayah*) seperti kata ad-dilalah. Secara etimologis dia memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*), dan berarti juga kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal qudrah*) seperti dalam ungkapan *al wali* (الولي) yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "tawalliy al-amr" (mengurus/ menguasai sesuatu).

2) Secara terminologi

Adapun pengertian perwalian istilah (terminologi) para pakar fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah al Zuhaily ialah kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi). Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (وليّة) dan jamaknya *al-awliya* (الاولياء), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (يلى - وليا - ولاية), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke 2, h. 134.

Sedangkan menurut KHI perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan hanafiah, membedakan perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu:

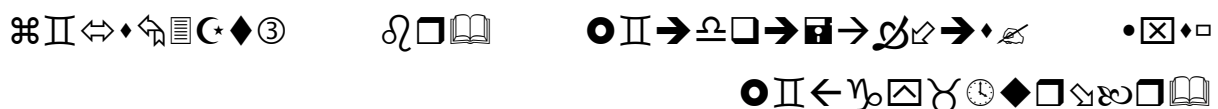
- a). Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah* „alan-*nafs*)
- b). Perwalian terhadap harta (*al-walayah* „alal-*mal*)
- c). Perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus.²

Perwalian yang di bicarakan di sini adalah perwalian dalam nikah, yang tergolong ke dalam *al-walayah* „alan-*nafs* (perwalian terhadap jiwa) yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Allah swt telah mensyari'atkan wali nikah sebagai seorang yang berhak mengakadkan.

1) Al-Qur'an



² Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki, 2001), cet. ke 1, h. 103.

menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR Ibnu majah dan Daruquthni).⁶

Pada dasarnya pernikahan itu mengandung maksud-maksud mulia yang mungkin tidak tercapai pada setiap pria dan memerlukan pengalaman tentang sikap kaum lelaki, siapa di antara mereka yang pantas mengarungi hidup berumah tangga dan siapa yang tidak. Perempuan tidak mudah mengenal sikap kaum lelaki karena kurangnya pengalaman, cepat setuju menikah dengan lelaki yang sebenarnya tidak pantas untuk menikahinya. Demi kemaslahatan, urusan pernikahan itu ditangani oleh kaum pria, karena merekalah yang lebih berpengalaman daripada kaum perempuan, sebab mereka banyak mengarungi urusan kehidupan dunia.

B. Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun persyaratan untuk menjadi wali atas seseorang dalam pernikahannya, ialah:

1. Kamal al ahliyah (orang-orang yang benar-benar berhak atas perwalian), yaitu dewasa, berakal, dan merdeka.
2. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah
3. Harus laki-laki (menurut 4 madzhab kecuali Hanafi)
4. Adil, artinya wali itu teguh pendiriannya (*istiqomah*) dalam menjalankan kewajiban agama, menghindari diri dari berbuat dosa besar (seperti berzina dan meminum khamr) dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil.
5. Al-Rusydu, artinya cerdas (menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali), maksudnya cermat dalam mempertimbangkan jodoh wanita yang akan dikawinkannya, sehingga calon

⁶ Syaokani, *Nail al-Authar Syarah Munataqa al-Akhbar*, (Mesir:Mustafa al-Babi al- Halaby wa Auladah) Juz V, h.2158

suami yang dipilih itu sepadan dengan wanita tersebut, menurut ulama madzhab Syafi'i cerdas itu tidak bersikap mubadzir dalam harta. menurut Madzhab Hanafi dan Maliki kecerdasan dalam arti tidak bersikap mubadzir terhadap harta tidak menjadi syarat bagi wali nikah. Jadi orang bodoh pun boleh menjadi wali nikah.⁷

C. Macam-macam Perwalian

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam,⁸ yaitu:

a) perwalian terbatas dalam akad nikah

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin *matsal* atau lebih dari itu. Baik menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan dewasa tidak dibenarkan mengawinkan dirinya sendiri ataupun orang lain, tetapi harus melalui seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinya. Walaupun demikian ada juga di antara mereka yang membolehkannya. Para fuqaha berselisih pendapat tentang pembuktian perwaliannya, menjadi tiga pendapat, yaitu:⁹

1. Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan beberapa sahabat

Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga terpandang, menurut Imam malik) itu tidak

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Usamah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke 2, h 14.

⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), cet. ke 1, h. 177

⁹ *Ibid*, h, 178

berhak menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain, tapi yang menikahkannya adalah walinya. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dasar mereka, yaitu:

- a. Firman Allah (QS. an-Nur ayat 32 dan al-Baqarah ayat 221)

Kedua ayat tersebut menunjukkan tentang pernikahan kepada kaum laki-laki tidak langsung kepada kaum perempuan yang hendak menikah, seolah-olah Allah hendak berkata kepada mereka, “janganlah kalian wahai para wali, menikahkan perempuan-perempuan yang berada di bawah kalian, kepada kaum musyrik.”

- b. Hadits Nabi.¹⁰

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل, ثلاث مرات, فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أبو داود)

Artinya : *Aisyah r.a merawikan bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda, “Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah mengaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar. Apabila terjadi perselisihan, maka shulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR Abu Daud.)¹¹*

- c. Pendapat para ulama

¹⁰ *Ibid*, h. 13

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid I, cet. ke-2h 810.

Bahwa perkawinan memiliki berbagai macam tujuan kebaikan. Sedangkan (kebanyakan) perempuan sering kali hanya tunduk kepada perasaan (atau emosi) hatinya, sehingga kurang mampu memilih yang terbaik secara rasional. Sebagai akibatnya, ia akan kehilangan banyak diantara tujuan-tujuan yang baik ini. Karena itulah, ia perlu dicegah dari melakukan sendiri akad nikahnya, dan harus menyerahkan persoalan pernikahannya itu kepada walinya, agar lebih banyak manfaat yang dapat diraih secara keseluruhan. Menurut Tirmidzi, pengalaman hadis Nabi tersebut dalam pernikahan, merupakan hal yang disepakati oleh para ahli ilmu diantara para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi thalib, Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Aisyah. Dan di antara para tabiin Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri al-Nakhai dan lain-lain. Demikian pula para fuqaha seperti Syafii, Akhmad, Sufyan ats-Tsauri, Ibn Hazm, ath-Thabari, dan lain-lain.

2. Madzhab Abu Hanifah, Zafar, dan Abu Yusuf (sahabat dan murid Abu Hanifah).¹²

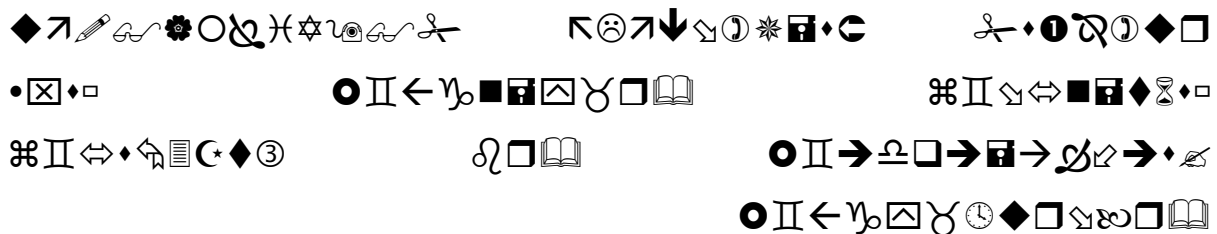
Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan mampu menguasai kendali dirinya (yakni yang selalu bertindak rasional dan tidak mudah terbawa oleh emosinya) boleh saja melangsungkan akad nikah bagi dirinya sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai kegiatan seperti akad jual beli, *ijarah* (sewamenyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah, baik ia seorang gadis (perawan) ataupun janda. Meskipun yang tetap lebih baik dan sangat dianjurkan baginya adalah mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki di antara para walinya atau kerabat terdekatnya, demi tetap terjaga kehormatannya dan harga dirinya, terutama di hadapan sejumlah laki-laki asing yang menghadiri akad nikahnya itu. Mereka menamakannya dengan *wilayah*

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *op cit*, h 179.

istihbab (wali yang dianjurkan). Tidak ada yang menentanginya apabila sang suami setara (kufu“) dan mas kawinnya adalah mas kawin matsal. Perempuan itu boleh mewakilkannya kepada selain walinya, sebagaimana ia juga boleh menikahkan orang lain.¹³

Berkenaan dengan pendapat tersebut (tentang tidak diperlukannya wali dalam pernikahan), Abu Hanifah dan para pengikutnya berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah



Artinya :“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.(QS.al-Baqarah: 232)¹⁴

Menurut mereka, ayat diatas dengan jelas menisbahkan aktivitas pernikahan kepada si perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dialah pelaku pernikahan tersebut secara hakiki.¹⁵

b. Dalam kenyataannya, Islam membenarkan perempuan bertindak sendiri dalam melaksanakan akad jual beli serta akad-akad yang lain. Maka sudah tentu ia lebih berhak lagi atas dirinya sendiri, dengan melangsungkan akad pernikahannya, sama seperti dalam akad-akad yang lain. Hanya agama masih memberikan hak pembatalan kepada para wali, dalam keadaan tertentu, yaitu apabila si perempuan bertindak gegabah, dengan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang

¹³ Syaikh Hasan Ayyub , *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 78

¹⁴ Depag RI, *op cit*, h. 56

¹⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub , *op cit*, h. 179

tidak sekufu', ia dapat dianggap telah mencorengkan aib pada anggota keluarga besarnya sendiri.

3. Abu Tsaur dan Syafi'i

Berpendapat bahwa akad nikah harus atas kerelaan perempuan dan walinya, baik ia gadis atau janda. Karena, pernikahan itu mengikat antara kedua keluarga dengan ikatan kasih sayang dan menambah anggota baru kepada keluarga sang istri. Mereka akan berinteraksi dengan orang-orang itu dan mengetahui segala rahasia keluarga. Akad seperti ini tidak dapat mengabaikan peran wali ataupun bertentangan dengan keinginan sang perempuan. Karena, dengan cara seperti itulah hubungan rumah tangga akan menjadi teratur.

b) Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

Perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (*wilayah ijbar*). Ada jenis lain perwalian ini yang disebut oleh Madzhab Hanafi sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan, atau janda. Menurut mereka, perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Tapi, dianjurkan akad tersebut diwakilkan kepada walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (*wilayah syirkah*), karena, apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.

Penyebab perwalian tidak terbatas, yaitu:¹⁶

- a. Hubungan kekerabatan. Baik kerabat dekat (ayah, kakek, anak laki-laki) maupun kerabat jauh (anak laki-laki paman [saudara ayah dan saudara ibu]).

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. ke-1, h. 1337

- b. Hubungan kepemilikan (seperti hamba sahaya dengan tuannya).
- c. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Seseorang mempunyai hubungan secara syara' dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya, jadi menurut ulama fiqh orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
- d. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang sahabat yang bukan kerabat yang mengikatkan diri untuk saling membantu¹⁷
- e. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya atau hakim.

Dengan mengkaji dan mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai hal di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah menjadi hak dan kepentingan perempuan sendiri, sehingga ia dibenarkan bertindak semaunya. Sebab, perkawinan adalah ikatan yang bukan saja mempersatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tetapi juga mempersatukan antara dua keluarga, dan mempererat persahabatan di antara para anggota kedua-duanya. Maka sungguh tidak wajar apabila para anggota keluarga yang lain termasuk para wali tidak diikutsertakan di dalam perikatan seperti ini, atau lebih tidak wajar lagi apabila hal itu berlangsung tanpa musyawarah sama sekali dan tanpa kerelaan mereka.

Sebaliknya, perkawinan bukan hak para wali saja, tetapi tentu hak si perempuan juga, bahkan haknya dalam hal ini jauh lebih kuat. Karena dialah yang akan menjalani hidupnya bersama suaminya, dan mengalami suka duka bersamanya. Maka bagaimana mungkin pendapatnya dalam hal ini dapat diabaikan begitu saja, lalu ia dipaksa menjalani

¹⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *op cit*, h. 184.

hidupnya diluar kerelaannya, seolah-olah ia bukan manusia yang berpikiran dan berperasaan.¹⁸

c) Orang-orang yang Harus Mendapatkan Perwalian

Menurut ulama fikih orang-orang yang harus berada di bawah perwalian, yaitu:¹⁹

1. Anak kecil.
2. Orang gila atau dungu.
3. Orang bodoh

Kemudian menurut Ibnu Rusyd, yaitu:

1. Anak kecil.
2. Orang bodoh (*as-safih*)
3. Budak (*al'abd*)
4. *Mufliis* (orang yang pailit karena boros)
5. Orang yang sakit
6. Istri

Sedangkan madzhab Hambali mengemukakan orang yang harus berada di bawah pengampuan/perwalian adalah *mufis*, *orang sakit*, *anak-anak*, *orang gila*, dan *orang bodoh*.

D. Perwalian Al-Laqith

1. Pengertian Al-Laqith

Menurut bahasa, *al laqith* disebut juga “*al-manbuz*”, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan.²⁰ Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan, diantaranya:

¹⁸ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), cet. ke-1, h. 64.

¹⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), cet. ke-3, h 184

²⁰ *Ibid*

- a. Menurut ulama madzhab Syafi'iyah, *al-laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.
- b. Menurut Imam Nawawi, *al-laqith* adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).²¹
- c. Menurut Malikiyah, *al-laqith* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.
- d. Menurut Hanabilah, *al-laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa mummayiz.
- e. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *al-laqith* adalah anak kecil yang hilang atau yang dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.
- f. Menurut Sayyid Sabiq²² *al-laqith* ialah anak kecil yang belum baligh, yang diketemukan di jalan atau tersesat di jalan, dan tidak diketahui keluarganya.
- g. Menurut Ibn Rusyd²³ *al-laqith* adalah anak kecil yang belum baliqh, yang di temukan tanpa diketahuai asal-usul dan keluarganya.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan.

²¹ Imam Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, terj. A. Shalahuddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid II, cet. ke-2, h ,288

²² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), cet. ke-1, h. 82.

²³ Ibn Rusyd, *op cit*, h. 296

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori *al laqith*, sedangkan al-Hanabilah dan al-Syafi'iyah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.

Adapun rukun laqith sebagai berikut:

- 1) Ilqoth/ iltiqoth, yaitu memungutnya adalah fardhu kifayah.
- 2) Laqith, yaitu anak kecil yang dibuang di jalan, masjid dan sebagainya, diketahui tidak ada yang menanggung dikarenakan beberapa sebab.
- 3) Multaqith, yaitu orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak agar dia bisa mengasuhnya, yaitu:

- a) Cakap hukum (*taklif*).
- b) Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari *tuan*-nya.
- c) Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya.
- d) Adil.

2. Wali Nikah Bagi Anak Temuan

Susunan orang-orang yang sah menjadi wali nikah, adalah:

- 1) Bapak.
- 2) Datuk (kakek), yaitu bapak dari bapak.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki sebapak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak.
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman).
- 8) Anak laki-laki dari paman.

9) Hakim²⁴

Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa kekuasaan penguasa atau hakim sebagai wali bagi orang-orang yang belum cakap bertindak hukum, merupakan kekuasaan umum yang sifatnya tidak begitu kuat, para ulama mengatakan perwalian yang bersifat khusus (seperti ayah, paman, kakek, atau orang yang diberi wasiat oleh ayahnya jika ia meninggal dunia) lebih kuat dari pada perwalian umum (penguasa dan hakim).

Menurut jumhur ulama, diantaranya Malik, as-Tsauri, al-Laits, dan Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "*ashabah*" (yakni para kerabat terdekat dari pihak ayah)²⁵ sebagaimana yang disebutkan di atas, kecuali hakim (nomor 1-8). Bahkan menurut Syafi'i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Selanjutnya bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali. Perlu juga diketahui, bahwa wali yang dekat, yang ditahan atau ditawan, sama dengan wali yang jauh, walaupun berada dalam satu kota.

Berbeda dengan Abu Hanifah, semua kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain, dibenarkan juga menjadi wali *zul arham* dalam pembagian warisan.

Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apa pun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan "kehormatan". Di zaman pra-Islam (yang dinamakan zaman jahiliah), beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau untuk melindungi keluarga dari risiko perilaku buruk dan memalukan.²⁶ Al-Qur'an mencela hal itu dengan sangat keras.

²⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1988), cet. ke-1, h.48.

²⁵ Muhammad Bagir Habsyi, *op cit*, h 64.

²⁶ Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lentera, 1997), cet. ke-2, h.36



Artinya:”Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami

*akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..(QS. al-An’am: 151)*²⁷

Seorang anak mempunyai kehormatan (harga diri), maka harus dipelihara dan dididik serta diperbaiki keadaannya.²⁸ Jadi apabila kita menemukan anak yang terbuang kita wajib memungutnya, karena memungut anak temuan merupakan pemurnian/ penyelamatan dari kehancuran dan amal sukarela yaitu dengan menjaganya/ merawat/ mengasuh.

3. Pendapat ulama tentang wali nikah anak temuan

Mayoritas ulama sependapat bahwa orang yang menemukan lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut ketika anak temuan tersebut akan menikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka berpegang juga pada hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang telah disepakati keshahihannya, dan bunyi hadits tersebut adalah:

لَانْكَاحُ إِلَّا بِوَالِي . وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأُولَى لَهُ

Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”²⁹

Berdasarkan hadits di atas menurut mereka orang yang berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak temuan) adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakim adalah urutan terakhir dari susunan wali.

²⁷ Depag RI, *op cit*, h, 100.

²⁸ Rifa’i, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2001), cet. ke-1, h .240

²⁹ Muhammad Nashiruddin, *op cit*, h 177.

Alasan yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa penguasa adalah orang yang berhak menjadi wali nikah anak temuan, yaitu dikarenakan penguasa adalah orang yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum dan sesuai dengan tertib wali, dalam hal ini hakim urutan terakhir setelah tidak adanya kerabat dekat dan kerabat jauh.³⁰

Kemudian ketentuan wali dalam hukum pernikahan di Indonesia dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 23 KHI, bagian ketiga pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Tidak adanya wali dalam perkawinan menyebabkan pernikahannya batal.

Selanjutnya pasal 20 disebutkan bahwa:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syariat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Disebutkan dalam pasal 23 bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau aib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.³¹

Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah ayah, kakek dari pihak ayah, kemudian laki-laki dari pihak saudara, dari pihak paman dan laki-laki dari pihak saudara

³⁰ Ghozali, *op cit*, h.53

³¹ Djaja S.Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), cet. ke 1, h. 87.

kakek. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali apabila tidak ada wali bagi calon mempelai istri atau karena adlonya (tidak mau menikahkan) wali yang ada.

Bila berkumpul wali-wali yang setaraf maka hendaklah yang menikahkan itu orang yang lebih dalam pengetahuannya tentang agama dan lebih taqwa. Dalam hal ini boleh saja hak perwalian itu pindah

1. Dari wali akrab kepada wali *ab'ad*

Hak perwalian itu dapat pindah dari wali akrab kepada wali *ab'ad*, apabila wali akrabnya:

- a) Tidak beragama Islam.
- b) Fasiq.
- c) Belum dewasa.
- d) Gila.
- e) Pikun (fasid pikirannya karena lupa).
- f) Bisu.
- g) Budak.

2. Dari wali nasab kepada wali hakim

Hak perwalian itu pindah dari wali nasab kepada wali hakim, apabila wali nasabnya:

- a) Tidak ada sama sekali.
- b) Adlol (tidak mau menikahkan) atau terjadi perselisihan diantara perempuan dengan wali.
- c) Mafqud (hilang tidak diketahui tempat tinggalnya).
- d) Sedang ihram (haji atau umrah).
- e) Bepergian jauh tanpa meninggalkan wakil.
- f) Ditahan atau dipenjara serta tidak dapat ditemui.

g) Tidak memenuhi syarat, sedang ab'ad tidak ada atau tidak memenuhi syarat.³²

³² Ghozali, *op cit*, h 53.

BAB IV
PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN

A. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat, membawa dampak meluasnya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya bayi-bayi yang lahir diluar nikah. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja di rumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat atau tidak sedikit yang selamat/masih hidup.

Islam telah menyeru kepada umatnya agar saling tolong-menolong diantara sesama dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Diantaranya dengan memungut/ merawat/menjaga anak temuan, karena merawat merupakan salah satu kebaikan diantara berbagai kebaikan yang disyari'atkan oleh Islam.

Selanjutnya penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak temuan. *al-laqith* dalam terminologi fikih diartikan: “anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.”¹

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina, atau hilang dan tercecer di luar kesadaran orang tua. Disamping itu, bencana alam juga potensial menimbulkan anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, disamping

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. ke 1, h. 1023

meluluh lantakan bumi Serambi Mekkah, telah mengakibatkan ribuan anak-anak terpisah dari keluarga, kehilangan keluarga, tanpa mengetahui lagi siapa keluarganya.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-Laq th* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal; Pertama, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Menurut Ibnu Qudamah anak temuan (ٱ) menurut bahasa adalah (anak yang di temukan), berwazankan ٱ tetapi bermakna sebagaimana lafadz ٱ dan ٱ yang bermakna dan . Sedangkan menurut istilah adalah anak yang lahir yang oleh orang tuanya kemudian dibuang karena takut miskin atau lari dari tanggung jawab. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa.²

Kemudian menurut Ibnu Qudamah, orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitabnya *al-Mughni*:

إذا التقط اللقيط من هو مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة أقر اللقيط في يديه
لأن حكمه حكم العدل في لقطه المال والولاية في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام ولأن الأصل في

Artinya: “Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/ sifat khiyanatnya), maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah serta di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil.”³

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni syar al-Kabir*, op cit, h. 374

³ *Ibid*, h 385.

Bahwasanya Ibnu Qudamah dalam berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya.

Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan atas hukum diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah. Selain itu beliau dalam berpendapat menitik beratkan pada unsur kebaikan yang ditunjukkan oleh si penemu tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa Ibnu Qudamah dalam hal ini yaitu mengenai hak orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan menurutnya adalah diperbolehkan, walaupun si *multaqith* tersebut tidak jelas sifat adil atau tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi tertentu seperti secara dhohir si *multaqith* adil, dikatakan adil karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si *multaqit* tidak mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pertama kali menemukan si anak temuan tersebut.

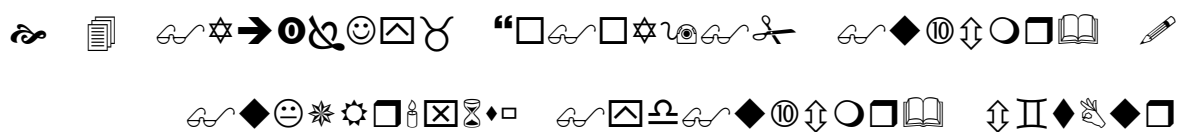
Alasan Ibnu Qudamah menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, yaitu karena:

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai qoul umar.
2. Ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara dhohir mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu
3. Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang

berbau materi, tetapi terutama dalam sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim (penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah anak temuan.

Berkaitan dengan pendapat beliau yang menyatakan diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah, yang dijadikan landasan utamanya adalah:



Artinya: "*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (QS. al-Maidah:32)⁴

Ketentuan al-Qur'an di atas adalah landasan utama yang digunakan imam Ibnu Qudamah dalam memperbolehkan orang yang menemukan anak temuan menjadi wali nikah. Menurut beliau ketika ada orang yang menemukan anak temuan kemudian memungut, merawat, dan mendidiknya berarti dia telah menghidupkan jiwa sesama muslim, dan dengan adanya sikap demikian dia dianggap bisa dipercaya dan adil dalam wali nikah. Dia disamakan dengan wali hakim yang adil.

Adil adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*). Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia, jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun pihak yang lain memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan sepihak itu hanya berlaku sementara waktu. Jika system sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan

⁴ Depeg RI, *op cit*, h. 114.

menimpa semua orang. Bahkan ketika telah terjadi ketidakseimbangan, maka kerugian bisa menimpa semua orang yang melanggar keadilan.⁵

Sifat adil bukan semata-mata bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain.⁶ Disini jelas bahwa orang yang menemukan adalah orang yang adil dan dapat dipercaya, sifat ini terlihat dari niat dia untuk memungut dan merawat anak temuan tersebut. Ini membuktikan bahwa si *multaqith* telah memperhatikan kepentingan orang lain (anak temuan).

Sedangkan kata adil yang menggunakan kata *qawwam* berarti “pendirian yang teguh” atau “berdiri tegak”. Dalam berdiri tegak orang tidak mudah terombang-ambing kekiri dan kekanan. Dan jika pun bergerak, ia bergerak dengan seimbang sehingga tidak jatuh. Disini terkandung unsur fleksibilitas yang menyebabkan seseorang tidak menyimpang. Inilah watak seorang pemimpin atau seorang yang bertanggung jawab, seperti seorang kepala rumah tangga. Seorang laki-laki dalam rumah tangga adalah *qawwam* atau pemimpin. (QS. an Nisaa’:34)

Kemudian dalam ayat 135 istilah *qawwam*, bergandengan dengan kata *qisth*. Di situ *qawwam* berarti seorang penegak, atau orang yang bertugas menegakkan sesuatu dan sebagai penegak, ia harus mempertahankan, memelihara atau menjamin yang ditegakkan itu (*securer*). Sebagai penegak dan penjamin, maka seseorang itu harus mampu menjalankan fungsi atau tugasnya dengan karakter yang adil.

Seseorang yang benar-benar bertindak adil adalah yang tetap jujur, sekalipun hal itu menyangkut dirinya sendiri, Ibu, Bapak atau tidak berpihak kepada seseorang yang telah menyimpang dari kebenaran.⁷

⁵ Amril, *Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani*, LSF2P (Lembaga Studi, Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan, dan Perempuan 2002), cet. ke 1, h. 388

⁶ *Ibid*, h. 374

⁷ Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. ke 2, h. 375

Makna keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dan berintikan kebenaran (*al-haqq*). Keadilan berarti pula, tidak menyimpan dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dapat disebut pula ketidakadilan dan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah tidak akan mengizinkan manusia mendzalimi diri sendiri.⁸

Yang dijadikan ukuran dalam keadilan adalah hukum. Dalam hal ini adalah syari'at Islam. Jadi lebih tepat adalah ketentuan sifat adilnya wali nikah berdasarkan ketetapan Allah Swt, yaitu dengan pertimbangan tanggung jawab dari si wali (orang yang menemukan) tersebut. Mengenai wali disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 51 ayat 2 dan KHI Pasal 107 ayat 4 yang menjelaskan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁹

Menurut penulis dalam menganalisis permasalahan tentang diperbolehkannya multaqith menjadi wali nikah anak temuan adalah kebolehan dengan pertimbangan tanggung jawab dari si multaqith. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qudamah karena dengan dijadikannya multaqith sebagai wali nikah berarti laqith telah menghargai jerih payah/ kasih sayang yang telah di berikan multaqith dari kecil sampai dewasa.

Kemudian dari segi psikologis anak juga, anak akan lebih tenang jika dia ketika dewasa dinikahkan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini multaqith. Di dalam keluarga pastinya terdapat rasa saling mengasihi yang erat antara anak temuan dengan orang yang menemukan yang tentunya antara keduanya ingin selalu berhubungan, terlebih masalah wali nikah, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbau materi, tetapi terutama sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang. Maka sungguh tidak etis jika multaqith telah merawat anak temuan tersebut dari kecil sampai

⁸ *Ibid*, h. 389

⁹ Djaja S.Meliala, *op cit*, h. 107.

dewasa tetapi ketika anak temuan itu akan menikah yang bertindak sebagai wali nikah justru orang lain. Hal ini sama saja tidak menghargai *multaqith*.

Jadi dengan melihat alasan di atas penulis berkesimpulan bahwa untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, untuk menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan *multaqith* (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah *multaqith*.

Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.

B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang wali nikah anak temuan.

Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath al-hukum* tentang hak orang yang menemukan (*multaqith*) sebagai wali nikah bagi anak temuan menggunakan langkah sebagai berikut:

Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak ada yang membahas secara khusus dan rinci tentang masalah wali nikah bagi anak temuan, akan tetapi beberapa ayat al-Qur'an bisa dijadikan rujukan (dalil) dalam perwalian anak temuan yaitu firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban umat Islam untuk merawat, membiayai dan mendidik anak punga, pemeliharaan anak yatim, dan anjuran untuk saling tolong menolong sesama manusia. Firman Allah, yaitu:



Artinya: "Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".(QS. al-Maidah:32)¹⁰

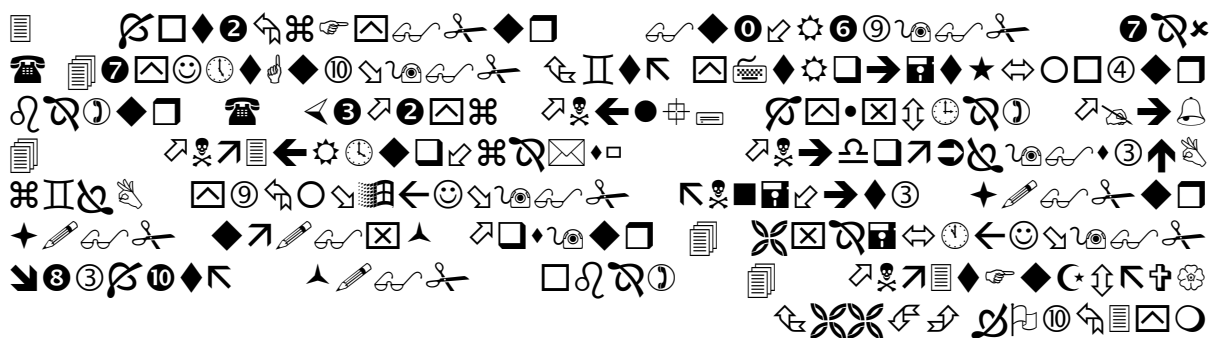


Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”
(QS. al- Maidah:2)¹¹

Laqith (anak yang di pungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan *ibnu sabil* (anak jalan) yang oleh Islam kita di anjurkan untuk memeliharanya. Firman Allah:



Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (QS. al-Insan:8).¹²



Artinya: “Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. al Baqarah: 220)¹³

¹⁰ Ibnu Qudamah, *op cit*, h 113.

¹¹ *Ibid*, h 375.

¹² *Ibid*, h 580.

¹³ *Ibid*, h 36.

Ayat di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan dalam menggali sebuah hukum mengenai kebolehan orang yang menemukan (*Multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak yang telah ditemukannya. Ibnu Qudamah di dalam mengistinbath-kan terhadap ayat di atas adalah dengan memahami teks ayat tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Karena *multaqith* telah menemukan dan menyelamatkan jiwa seorang anak dari bahaya, maka dia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya dan dia berhak menjadi wali. Mengurus mereka (anak yatim) secara patut dalam hal ini yaitu menjadi wali nikah khususnya anak temuan adalah hal yang baik dan sangat dianjurkan. Karena dengan menjadi wali nikah dia secara otomatis telah melaksanakan tugas menjadi orang tua yang siap menjaga, sesuai dengan tujuan pada saat pertama kali dia menemukan si anak tersebut.

Di dalam kitab *al-mughni* dinyatakan (لأن الحضانة ولاية) ”Hak asuh adalah perwalian”. Berdasarkan istilah tersebut ketika seorang memungut anak dan kemudian mengasuhnya, maka secara otomatis ia memiliki hak perwalian atas anak temuan tersebut, karena dengan niat dia (orang yang menemukan) merawat dan menjaga adalah sebagai salah bukti dia dapat dipercaya dan dikatakan adil, dimana adil merupakan syarat menjadi wali nikah.

2. As-Sunnah

من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

Artinya: *Barang siapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum didahului oleh*

*orang muslim, maka ia yang lebih berhak atasnya.*¹⁴

Hadits di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan kedua setelah al-Qur'an dalam melakukan langkah *istinbath al-hukum* mengenai masalah wali nikah anak temuan.

¹⁴ *Ibid*, h 384.

Beliau di dalam meng-*istinbath*-kan terhadap hadits di atas adalah dengan memahami teks hadits tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa yang lebih dahulu atas sesuatu berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut dalam hal ini *multaqith*lah yang berhak menikahkan *laqith*.

3. Qoul shahabat

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-*istinbath* selain al-Qur‘an dan as-Sunnah adalah qoul sahabat:

وقال عمر لأبي جميلة في لقطة هو حر ولك ولاؤه علينا نفقته

Artinya: Umar telah berkata kepada abi jamilah dalam menemukan sesuatu, Ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan atas kami kewajiban nafkahnya.¹⁵

ان عمر رضي الله عنه عنى بقوله : لك ولاؤه اي لك ولايته والقيام به وحفظه

Artinya: Memahami perkataan umar r.a yang berbunyi: "bagimu hak perwalian", maksudnya bagimu hak perwalian dan merawatnya.¹⁶

Dalil di atas menjelaskan mengenai masalah wali nikah anak temuan. *Walaa'uhu* (hak perwalian) maksudnya hak penemu (*multaqith*) untuk menjadi wali, dengan alasan dia orang yang sholeh, dapat dipercaya, dalam hal ini sama saja antara imam dengan selain imam, karena merupakan urusan kebaikan (*ta'awanu* „*ala al bir*).

قال عمر رضي الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض

Artinya: Shahabat umar telah berkata: "Orang-orang muslim adalah adil atas sebagian yang lain".¹⁷

¹⁵ Ibid, h. 383

¹⁶ Ibid,

¹⁷ Ibid. h 386

Dalam konteks tersebut secara tegas, menunjukkan bahwa sahabat Umar mengatakan bahwa orang muslim itu dihukumi adil, jadi dia (orang yang menemukan) bisa menjadi wali nikah bagi anak temuan, karena dia seorang muslim yang otomatis dianggap adil dalam mengadakan akad. Adil adalah salah satu persyaratan bagi multaqith dan wali nikah.

4. Metode Qiyas

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang wali nikah anak temuan adalah berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, dan qoul sahabat. Kemudian metode yang dia gunakan dalam melakukan ijtihad adalah dengan metode *Qiyas*, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah tersebut, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan sebuah hukum.

Qiyas menurut bahasa ialah mengukurkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya agar diketahui adanya persamaan antara keduanya.¹⁸ Menurut Ibnu Qudamah qiyas adalah menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.¹⁹ Ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam istinbath hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini.²⁰

Golongan pertama, menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan *hujjat ilahiyah* yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.²¹

¹⁸ Chaerul umar, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), cet. ke 3, h 93

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke 2, h. 173

²⁰ Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke 2, h.86

²¹ *Ibid.*

Jadi, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash , dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.²²

Imam Ibnu Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* multaqith dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil. Jadi, kebaikan tidak harus dipegang oleh wali hakim, tetapi setiap orang muslim, dalam hal ini orang yang menemukan (multaqith) juga bisa memegang segi kebaikan, sebagai wali nikah anak temuan tersebut.

C. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang wali nikah anak temuan.

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-sunnah). Imam Abu Zahrah berkata:

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليها على استنبط في الشريعة الإسلامية

Artinya: “*Nas-nas al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilan hukum dalam syari'ah islamiyyah*”.²³

Menurut analisis penulis, Ibnu Qudamah dalam beristinbath tentang diperbolehkannya orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah sudah sesuai dengan yang disyari'atkan oleh Allah karena adanya sifat adil. Menggunakan metode qiyas dan dasar beliau menggunakan qoul sahabat.

Kebaikan tidak harus dipegang oleh wali hakim karena lebih utama-utamanya manusia adalah dia yang dapat dipercaya, hal ini sesuai dengan unsur qoul Umar yang telah disebutkan di atas, ditetapkannya Abi Jamilah sebagai wali karena dia dikenal sebagai orang

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke 1, h. 66

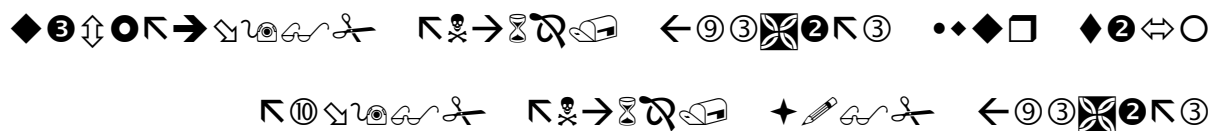
²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), h. 15

yang sholih dan ia orang yang lebih dahulu menemukan. Hal ini juga sesuai dengan qoul nabi:

من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به

Artinya: “Barang siapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum terdahului oleh orang muslim, maka ia yang lebih berhak atasnya”.²⁴

Penulis cenderung memilih pendapat Ibnu Qudamah yang memperbolehkan orang yang menemukan (*multaqith*) sebagai wali nikah anak temuan. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut sebagai bentuk kelenturan agama Islam dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat menurut keadaan: Allah Swt telah berfirman:



Artinya: “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS. al Baqarah : 185)²⁵

Bahwasanya ayat diatas cukup jelas bahwa Allah swt tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan suatu agama, dan Islam adalah agama yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi jika dirasa dengan tidak menjadikan orang yang menemukan sebagai wali nikah menimbulkan efek yang buruk bagi keduanya, maka barulah diperbolehkan orang yang menemukan sebagai wali nikah, karena Allah selalu memberikan kelonggaran bagi umatnya apabila umatnya mendapatkan kesulitan.

Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

المشقة تجلب تيسير

Artinya:” kesulitan menarik kepada kemudahan”.²⁶

²⁴ Ibnu Qudamah, *op cit*, h 384.

²⁵ Depag RI, *op cit*, h. 29

²⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke 2 h. 82

Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika ditemukan suatu persoalan yang sulit dipecahkan, Islam memberikan terobosan-terobosan baru agar dapat terwujud tujuan syari'at itu sendiri. Dan selain itu Islam juga memberikan keluasaan, khususnya dalam memahami dan mengamalkan syari'at.

Dan untuk kemaslahatan bersama, demi menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan multaqith (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah multaqith. Sebagaimana kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*²⁷

Yang terpenting dalam hal ini, yaitu diperbolehkannya orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak temuan, sepanjang tidak ada yang dirugikan, tetapi jika ada salah satu yang merasa dirugikan, misalnya orang yang menemukan tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik atau tidak jujur, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa yang berkewajiban atas anak temuan tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Jangan melakukan mudharat kepada orang lain karena sebab (telah menyakiti kamu) atau karena tidak ada sebab"*²⁸

Ibnu Qudamah sebagaimana generasi ulama' Hanabillah dalam beristinbath hukum lebih cenderung menggunakan metode qiyas. Beliau *mengqiyaskan* multaqith dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil.

²⁷ Ibid, h. 74

²⁸ Ibid, h. 67

Dengan melihat pendapat beliau bahwa untuk menjadi wali nikah bagi temuan tidak harus seseorang yang mempunyai jabatan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah sikap keadilannya, sikap keadilannya dapat dilihat dari cara dia mau memungut dan mendidiknya, menurut pendapat penulis apabila karena jabatan dia belum tentu mempunyai sikap yang demikian. *Multaqith* adalah orang yang benar-benar mengetahui segala apa yang dibutuhkan si *laqith* karena dia telah merawat *laqith* dari kecil sampai dewasa lain halnya bila dibandingkan penguasa karena jabatannya, sehingga dia perlu diperjuangkan untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai “Kebolehan Orang yang menemukan (*multaqith*) sebagai wali nikah bagi anak temuan. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang membolehkan orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan, adalah berdasarkan al- Qur'an, as-Sunnah, Qoul Sahabat. Menurut beliau menjadi wali nikah bagi anak temuan tidak harus mempunyai jabatan kekuasaan. Alasan beliau adalah orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dikatakan dia (*multaqith*) adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya, yang otomatis dia juga mampu (siap) menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.
2. Istinbath Hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang diperbolehkannya *multaqith* menjadi wali nikah bagi anak temuan adalah dengan menggunakan *qiyas*, dikarenakan *multaqith* disamakan dengan penguasa karena keduanya sama-sama mempunyai sifat adil. Pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya *multaqith* sebagai wali nikah anak temuan, apabila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat muslim di Indonesia sekarang ini sudah tidak relevan lagi, karena Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hukum dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan secara Islam, menjelaskan bahwa untuk menjadi wali hakim harus ada keputusan dari

Menteri Agama. Dengan ketentuan tersebut, tidak mudah menjadi wali hakim dalam hal ini wali nikah bagi anak temuan tersebut yang walinya tidak diketahui (ghaib).

B. Saran-Saran

1. Untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan yang terpenting adalah sikap mau memungut/merawat dan menjaganya, kalau sikap itu dijalankan dia sudah dianggap seseorang yang adil dalam melakukan akad, dalam hal ini menjadi wali nikah
2. Diperbolehkannya orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak temuan, hendaknya sepanjang tidak ada yang dirugikan, tetapi jika ada salah satu yang merasa dirugikan, misalnya orang yang menemukan tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik atau tidak jujur, maka anak tersebut baru bisa atau bahkan wajib diambil darinya dan penguasa yang berkewajiban atas anak temuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) cet. ke 2.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke 2.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), cet. ke 1.
- Al-Kasani, *Badai' as-Shanai'*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, juz. 8).
- Amril, *Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani*, (LSFK2P Lembaga Studi, Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan, dan Perempuan, 2002) cet. ke 1.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana : 2009), cet. ke 2.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), cet. ke, 2.
- Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta:Lentera, 1997), cet. ke 1.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke 3 .
- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), cet. ke 1.
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2010), cet. ke 2.
- Chaerul uman, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), cet. ke 1.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), cet. ke 3.
- Djaja S.Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), cet. ke 1.
- Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an,Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. ke 2.

Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1988), cet. ke 1 .

Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki, 2001), cet. ke 1 .

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu Qudamah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah)”10/8/ 2013

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Usamah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke 2.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni syar al-Kabir*, Beirut : Darul Fikri.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Ahmad Hotib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke 2.

Imam Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, terj. A. Shalahuddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid II, cet. ke 2.

Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke 1.

Mahmud Syalthut, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet. ke 1.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz II, cet. ke 3.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke 2.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Thurmudzi*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke 3.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid I, cet. ke 3.

M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), cet. ke 1.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002). cet. ke 2.

Rifa'i, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: PT. Karya toha putra 2005), cet. ke 2.

Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke 3.

Sayyid bakri, *I' anatuth Thalibin*, (Beirut Libanon: Dar al Kitab Ilmiyah, tt), juz 3.

Syekh Ibrohim al Bajuri, *Al-Bajuri*, (Daru Ikhya'i Kitab al Arobiyah,tt), juz 2.

Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Munataqa al-Akhbar*, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladah) Juz V.

Syaikh Hasan Ayyub , *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. ke 1.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirud Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt).

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuh*,(Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr) , tt, juz. 6.